

**PENGARUH PENGETAHUAN UMUM,
TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB
MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN
VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS
DESA/KELURAHAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Silvia Syarifah Kusumaputri
NIM. 12030110120135

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Silvia Syarifah Kusumaputri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120135

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

Semarang, Januari 2015

Dosen Pembimbing

Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

NIP. 1968 0121 199303 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Silvia Syarifah Kusumaputri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120135

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGETAHUAN UMUM,
TINGKAT EKONOMI, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA
DAN KOTA DENGAN VARIABEL
MODERATING SIKAP PETUGAS
DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kabupaten Kendal)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji :

1. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
3. Drs. Agustinus Santosa A., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Silvia Syarifah Kusumaputri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Januari 2015

Yang Membuat Pernyataan

Silvia Syarifah Kusumaputri

NIM. 12030110120135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kaupun punya kekurangan dan orang lainpun punya lidah.

-Imam Syafi'i-

Do it now. Sometimes "later" becomes "never"

-Diana Rikasari-

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.

-Ali bin Abi Thalib-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah, ibu, dan kakaku

Serta seluruh keluarga dan teman-temanku

ABSTRACT

This study is conducted to determine the factors that may affect the Land and Building Tax Compliance in Kendal and to compare the taxpayer's Tax Compliance Urban and Rural. Property tax revenue is one of the areas that are important because it is used for regional development. In addition, the Land and Building Tax (PBB) has the largest taxpayers other than tax, and revenues from year to year increased by a greater percentage than other taxes. Therefore, the Tax Compliance is important in its contribution to the development and prosperity of the region.

The tax payer's compliance that observed in this study is influenced by factors Public Knowledge, Economic Level and Tax Knowledge which is moderating by the Attitude of Officer Rural/Urban Village. All variables were measured using a 5-point Likert scale questionnaire. Samples were taken by convenience sampling method, the method of determination of the sample based upon coincidence, members of the population encountered by researchers and willing to be sampled respondents who live in rural and urban areas Kendal. Method of testing is done by linear regression analysis and t-test-test is processed by PASW Statistics version 18.

The results have shown that the General Knowledge, Economic Level and Tax Knowledge is significant influence on the Tax Compliance. And on the other hand, the Attitude of Officer Rural/Urban Village can strengthen the influence of General Knowledge, Economic Level and Tax Knowledge in the Tax Compliance. In a subsequent, this study is expected to use a wider range of independent variables in predicting the effect on the dependent variable in order to obtain more specific results.

Keywords: *Land and Building Tax, Tax Compliance, General Knowledge, EconomicLevel, Tax Knowledge, Attitude of Officers Rural/Urban Village*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal dan untuk membandingkan Kepatuhan Pajak dari wajib pajak Perkotaan dan Pedesaan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pemasukan daerah yang penting karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai wajib pajak terbesar dibanding pajak lainnya, dan penerimaannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan persentase lebih besar dibandingkan pajak yang lainnya. Oleh karena itu, Kepatuhan PBB merupakan hal penting dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Kepatuhan PBB yang diteliti dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak yang disertai dengan adanya Sikap Petugas Desa/Kelurahan. Semua variabel penelitian diukur dengan menggunakan kuisioner skala likert 5 poin. Sampel penelitian diambil dengan metode convenience sampling, yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel yang bertinggal di daerah desa dan kota Kabupaten Kendal. Metode pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier dan uji beda t-test yang diolah dengan PASW Statistics versi 18.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan PBB. Dan di sisi lain, dengan adanya Sikap Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel bebas yang lebih beragam dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel terikat agar diperoleh hasil yang lebih spesifik.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan PBB, Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak, Sikap Petugas Desa/Kelurahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal)”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari pengorbanan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Suharnomo S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. selaku dosen yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Faisal, S.E., M.Si., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

4. Seluruh dosen FEB Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf administrasi dan karyawan FEB Universitas Diponegoro Semarang (khususnya Mas Imam) yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Orangtua tercinta Bapak Kusuma Adji dan Ibu Sulistyaningsih yang selalu memberikan motivasi, nasehat dan doa yang tiada henti serta kakak saya tercinta Amalia Ratna Kusumaningrum yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk penulis. Semoga penulis dapat selalu membuat mereka bahagia selamanya.
7. Teman terdekat yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir, Rahardian Isnu Hananta, Fisabella Dea Migiana, Tatyana Putri Ariningrum, dan Arvina Arief.
8. Teman-temanku yang telah berjuang bersama dan telah menghabiskan suka duka dan mendengarkan keluh kesah dari awal kuliah sampai akhir, Vina, Novy, Hisyam, Indri, Dika, Lina, Anitya, Andi, Tatang, Erlang, Evan, Rido, Seger, Fian, Alto, dan Toying.
9. Teman-teman SONIC (Saman Economic) angkatan 2010 yang paling rumpi, Intan, Maya, Mila, Rigiz, Vina, Fani, Tami, Tarina, dan Fifie.
10. Teman-teman KKN Desa Kertijayan, Pekalongan, (Aha, Papuj, Ajun, Natalia, Doni, Mitha, Elsa, Nindi, Devi, Ike, Dimas, Adit, Bob, Faizal, Rani) terima kasih atas kebersamaan, suka, duka dan keceriaannya.

11. Teman-teman nongkrong ICT Smapa, (Tyta, Luna, Ina, Isna, Mitha, Ica, Alin, Dewi, Wida, Panji, Apis, Patrick, Nanda, Cao, Ical, Ilham, Yaya, dkk).
12. Teman-teman Akuntansi 2010 R1 yang sangat membanggakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
13. Mbak Kun, yang telah membesarkan Mbak Lia dan penulis, terima kasih atas seluruh waktu dan kasih sayang yang telah diberikan.
14. Semua responden yang digunakan untuk pengambilan data penelitian. Terima kasih atas semua kerjasama dan kesediaannya untuk meluangkan waktu hingga penulis bisa memperoleh data penelitian.
15. Semua pihak yang telah membantu tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dorongan dan doa sekecil apapun yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya.

Semarang, Januari 2015

Silvia Syarifah Kusumaputri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	15
2.1.2 <i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA)	16
2.1.3 Pengetahuan Umum.....	16
2.1.4 Tingkat Ekonomi	20
2.1.5 Pengetahuan Perpajakan	21
2.1.6 Pajak.....	23
2.1.7 Pajak Bumi Dan Bangunan.....	27
2.1.8 Kepatuhan Membayar Pajak	31
2.1.9 Sikap Petugas	32
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran	36

2.4	Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1	Pengetahuan Umum Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak	36
2.4.2	Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak	37
2.4.3	Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak	38
2.4.4	Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Sikap Petugas Sebagai Variable Moderasi	39
BAB III		41
METODE PENELITIAN		41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	41
3.1.1	Variabel Dependen: Kepatuhan Pembayaran Pajak	41
3.1.2	Variabel Independen	42
3.1.3	Variabel Moderating: Sikap Petugas	43
3.2	Populasi dan Sample	44
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis	46
3.5.1	Statistik Deskriptif	46
3.5.2	Uji Reliabilitas dan Validitas	46
3.5.3	Uji Regresi Linier Berganda	48
3.6	Uji Beda	50
3.6.1	Uji One Sample T-Test	50
3.6.2	Uji-t Berpasangan (<i>paired t-test</i>)	51
BAB IV		52
HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Identitas Responden	52
4.1.1	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
4.1.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden	52
4.1.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal	53
4.2	Diskripsi Sampel dan Analisis Deskriptif	54
4.2.1	Statistik Deskriptif	54
4.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	58
4.3.1	Uji Validitas	58
4.3.2	Uji Reliabilitas	59
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda - Persamaan I	60

4.5	Analisis Regresi Linier Berganda - Persamaan II.....	62
4.6	Uji Beda	65
4.7	Uji Hipotesis	67
4.7.1	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB	67
4.7.2	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap Petugas Desa/Kelurahan.....	68
4.7.3	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB.....	68
4.7.4	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap Petugas Desa/Kelurahan.....	68
4.7.5	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB	69
4.7.6	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap Petugas Desa/Kelurahan.....	69
4.8	Pembahasan	69
4.8.1	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB	69
4.8.2	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap petugas Desa/Kelurahan	71
4.8.3	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB.....	72
4.8.4	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap Petugas Desa/Kelurahan.....	74
4.8.5	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB	74
4.8.6	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Sikap Petugas Desa/Kelurahan.....	76
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Keterbatasan.....	79
5.3	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan Tahun 2009-2014	9
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal	54
Tabel 4.4 Sampel Penelitian	55
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif.....	56
Tabel 4.6 Uji Validitas.....	60
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Indikator Variabel	61
Tabel 4.8 Model Regresi Persamaan I.....	62
Tabel 4.9 Koefisien Regresi Persamaan I.....	63
Tabel 4.10 Model Regresi Persamaan II	64
Tabel 4.11 Hasil Anova Persamaan II	65
Tabel 4.12 Koefisien Regresi Persamaan II	65
Tabel 4.13 Uji Beda T-Test	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuisisioner Responden	88
Lampiran B Hasil Output SPSS	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena bersifat memaksa, maka seharusnya seluruh warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharuskan untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu sumber penerimaan negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Sebagai negara yang sedang berkembang dan masih memiliki pertumbuhan ekonomi positif tentu akan mendatangkan keuntungan tersendiri dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Sektor pajaklah merupakan opsi yang bisa dijalankan dibandingkan dengan harus melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga internasional untuk membiayai belanja negara yang akan dituangkan dalam APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang

memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). Sumber utama pendapatan APBN berasal dari pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak (Masinambow, 2013).

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara sampai dengan dekade 2010-an, yaitu mencakup kurang lebih $\frac{2}{3}$ dari penerimaan negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan

kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan umum dari setiap individu wajib pajak, tingkat ekonomi, dan juga pemahaman akan peraturan perpajakan.

Selain faktor-faktor tersebut, perilaku wajib pajak untuk bertindak patuh atau tidak juga dilatarbelakangi oleh adanya sikap dari petugas pajak yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor tersebut. Sikap petugas terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memungut pajak dari wajib pajak atau perangkat desa/kelurahan dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kemauan wajib pajak untuk berlaku patuh. Oleh karena itu, sikap petugas tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari faktor pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak terhadap kecenderungan sikap wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh atau tidak.

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Oleh karena itu, pengetahuan umum merupakan suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi cara berpikir dari seseorang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas,

akan senantiasa berkeinginan untuk belajar dan mengolah berbagai informasi. Dengan adanya pengetahuan yang luas, maka individu tersebut secara tidak langsung akan berusaha untuk pengembangan potensi dirinya hingga kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengetahuan umum yang diperoleh dapat membentuk suatu pola pikir dan perilaku dari individu untuk bertindak.

Selain pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 1994). Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk berperilaku. Namun tidak semua warga yang memiliki tingkat ekonomi tinggi berperilaku baik dan patuh dalam membayar pajak. Masih banyak diantara mereka yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau bahkan tidak pernah membayar pajak sama sekali.

Dalam penelitian Rahayu, *et al* (2006) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Peneliti ingin mengetahui apakah konsultan benar-benar mewakili sikap dari wajib pajak orang

pribadi atau tidak, dan dengan adanya konsultan reaksi wajib pajak semakin patuh ataupun tidak. Selain itu peneliti juga ingin membuktikan model penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen *et al.* (1994) dalam Witono (2008), bahwa wajib pajak yang memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Upaya dalam menghindarkan diri dari pajak dikategorikan dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah penghindaran pajak dengan cara legal (*tax avoidance*). Dalam tipe ini, wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan mencari kelemahan peraturan perpajakan (*loopholes*). Upaya yang dilakukan adalah legal dan tidak menyalahi peraturan yang ada. Tipe kedua adalah penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). Dalam tipe ini, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya yang seharusnya terkena pajak. Tindakan ini dapat dikenai hukuman. Dan tipe ketiga adalah penunggakan pembayaran pajak (*tax arrearge*). Penunggakan pajak adalah tipe lain dari ketidakinginan membayar pajak. Sama halnya dengan “*tax evasion*”, menunggak pembayaran pajak dapat dikenakan hukuman (Ancok, 2004).

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri (Hardiningsih, 2011).

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih, 2011).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat besar, yaitu 70% (Rahmawaty *et al*, 2011). Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Saat ini, Dirjen Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Prasetyo, 2006) dalam Rahmawaty *et al* (2011). Estensifikasi

dan intensifikasi pajak biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah seperti warung kopi yang demikian dinamis tertinggal jauh dari jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) telah dipasang, tetapi masih ditemukan warung-warung kopi yang lepas dari jeratan pajak. Bahkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang seharusnya dimiliki oleh pemilik warung kopi dan harus diperpanjang setiap tahun tidak menjadi perhatian utama mereka.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 2 ayat 1), Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajibannya. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata

imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan dari wajib pajak (Rahmawaty *et al*, 2011).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2007). Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012). Akan tetapi dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010).

Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan rincian realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2009-2014, ditampilkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: (*dalam Miliar rupiah*)

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan
Tahun 2009 – 2014

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	- 1	0	0	0
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan Internasional	18.670	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978

Sumber: <http://www.bps.go.id>, 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun sehingga membuat tugas Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak masih menghadapi kendala antara lain belum optimalnya hasil atau *output* dari penerimaan pajak yang dirasakan langsung oleh Wajib Pajak (WP). Selain itu, ditambah maraknya kasus-kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi bekerjasama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, semisal kasus Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012 (Rahman, 2013). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui

perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011).

Pada kenyataanya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Nugroho, 2012). Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya (Purwanto, 2006). Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Kendal. Latar belakang yang dimaksud meliputi pengetahuan umum wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, serta sikap yang diberikan oleh petugas terhadap para wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara. Sehingga tanpa adanya peran wajib pajak yang patuh dalam pembayaran pajak maka negara tidak akan berjalan dengan baik. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang masih mangkir dalam membayar pajak. Terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti tentang fenomena tingginya kepatuhan pajak yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Kendal mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB?
2. Apakah Sikap Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari wajib pajak di desa dan kota di wilayah Kabupaten Kendal terhadap Kepatuhan PBB?
3. Apakah terdapat perbedaan Kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Kendal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan secara empiris bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak wajib pajak di desa dan kota di wilayah Kabupaten Kendal mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.
2. Membuktikan secara empiris bahwa Sikap Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB.
3. Membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan Kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi tambahan mengenai indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan PBB, khususnya yang berkaitan erat dengan faktor-faktor perbedaan pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak wajib pajak di desa dan kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penelitian ini mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya terdapat uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan skripsi yang berupa uraian singkat mengenai bab-bab skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yaitu teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya, definisi operasional variabel, populasi, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini diawali dengan deskriptif dari data tiap-tiap variabel yang menunjang pembahasan hasil penelitian. Kemudian dibahas mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang menyajikan kesimpulan, kelemahan dan potensi bagi riset di masa mendatang.